

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Penulis menyimpulkan bahwa penjelasan berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan Laporan Tugas Akhir tentang Tinjauan Tata Cara Pencairan Uang Persediaan pada Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bab sebelumnya:

1. Proses pencairan uang persediaan di Pengadilan Negeri Cibinong melibatkan beberapa pihak penting yang penting. Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Kuasa Pengguna Anggaran merupakan empat kelompok yang paling penting. Setiap pihak memiliki tanggung jawab dan fungsi khusus untuk memastikan bahwa prosedur pencairan berjalan dengan tepat waktu dan akuntabel.
2. Selain itu ada sejumlah dokumen penting yang mendukung proses pencairan uang persediaan pada Bagian Umum dan Keuangan di Pengadilan Negeri Cibinong, yang meliputi:
 - a. Surat Permohonan Usulan Uang Persediaan (UP) Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Permohonan untuk alokasi dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional harian dibuat dalam dokumen ini.

- b. Surat Persetujuan Besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Surat tersebut berfungsi untuk mengesahkan jumlah dana yang disetujui untuk dicairkan melalui Kartu Kredit Pemerintah.

- c. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM - UP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP - UP).

Surat perintah resmi digunakan untuk mengajukan permintaan pencairan dan melakukan pembayaran uang untuk persediaan.

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Surat perintah resmi untuk mencairkan dana yang telah disetujui.

3. Proses pencairan uang persediaan di Pengadilan Negeri Cibinong telah dirancang dengan baik dan berfungsi dengan baik untuk membantu operasional lembaga tersebut. Sudah terbukti bahwa prosedur ini, yang mencakup semua langkah yang diperlukan mulai dari permohonan, verifikasi, hingga pencairan dana, dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas.

V.2 Saran

Pengadilan Negeri Cibinong telah menerapkan prosedur pencairan uang persediaan yang sangat baik yang berperan penting dalam mendukung operasional instansi. Prosedur-prosedur ini dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap langkah mulai dari pengajuan permohonan hingga verifikasi dan pencairan dana dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat diterapkan pada setiap tahapan untuk meminimalkan kesalahan dan mencegah penyalahgunaan dana.

Secara keseluruhan kualitas proses penairan uang persediaan di Pengadilan Negeri Cibinong sangat baik. Dengan secara konsisten menjaga prosedur-prosedur ini bisa dipastikan bahwa pengelolaan dana dijalankan dengan baik dan terus mendukung operasional yang efektif dan bertanggung jawab.